

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum berperan sebagai gerakan yang mengarah pada peristiwa dan perubahan penting. Sebagai realisasi dari sistem pemerintahan yang berdaulat pada rakyat, pemilihan umum melibatkan dinamika yang berhubungan dengan aspek politik, masyarakat, dan ekonomi. Dinamika ini tidak dapat dipisahkan dari proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Pemilihan umum bisa dilakukan secara demokratis di mana pemilih memilih pemimpin publik. Pemilihan diadakan terutama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan dan pemimpin yang akan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ada berbagai jenis pemilihan di Indonesia, seperti: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Memilih pemimpin masa depan bangsa, presiden dan wakil presiden. Pemilihan Legislatif: Memilih perwakilan masyarakat di tingkat federal, provinsi, dan lokal untuk duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pemilihan Kepala Daerah: Memilih walikota, gubernur, atau bupati untuk memimpin pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota.<sup>2</sup>

Pemilu dilakukan secara periodik serta berfungsi untuk memastikan adanya pergantian kekuasaan secara damai dan menyampaikan legitimasi kepada pejabat yang terpilih. Proses ini biasanya melibatkan pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara.<sup>3</sup>

Pemilihan legislatif di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun, bersamaan dengan Pemilihan Presiden. Prosesnya meliputi pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). Para pemilih

---

<sup>1</sup> Siti Zuhro, dkk. 2022. *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Leutika Prio), 11.

<sup>2</sup> Ibid., hlm 12

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum. 2019. Modul Pemilu di Indonesia (Jakarta: KPU RI), 1. [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf) diakses pada tanggal 03 mei 2025.

memilih calon anggota legislatif dari partai politik yang mereka dukung, dan hasil pemilihan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.<sup>4</sup>

Pada masa reformasi, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan umum.<sup>5</sup> Pemilu dianggap sebagai prasyarat utama dalam membangun sistem politik demokratis sesuai dengan Konstitusi selama era Orde Baru. Setelah periode tersebut, dua pemilu diadakan pada masa reformasi. Peralihan kekuasaan dari Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 kepada B.J. Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pada 10 November 1998, Habibie bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, yang menghasilkan Deklarasi Siganjul, menyatakan bahwa pemilu demokratis merupakan pilihan yang baik untuk mengakhiri pemerintahan transisi.<sup>6</sup>

Peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional, sehingga ada perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, aturan, dan budaya. Reformasi suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang mencakup aspek politik, aspek ekonomi, serta aturan. Reformasi pada Indonesia ialah suatu arah buat menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa orba yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai ringkih serta sudah tidak cocok lagi buat Indonesia.<sup>7</sup>

Kaum muda, terutama mahasiswa, memainkan peran penting dalam membentuk tuntutan reformasi yang diajukan oleh berbagai segmen masyarakat Indonesia. Mereka secara konsisten memperjuangkan perubahan pada struktur politik yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Puncak dari aktivitas ini terjadi

---

<sup>4</sup> Fiski Priyanti. 2005. Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Negeri Semarang. Hlm 1

<sup>5</sup> Muhamad Hakiki. 2016. Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1 (1). 4-5

<sup>6</sup> Simamora, Janpatar, 2014. Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, *Jurnal RechtsVinding*, 3 (1). 28-42

<sup>7</sup> Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja. 2020. Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal Of Indonesian History* 9 (2). 102

pada tahun 1998 dengan gerakan mahasiswa di Indonesia, yang dianggap bersejarah karena berhasil memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.<sup>8</sup>

Pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998 menjadikan Habibie sebagai presiden baru Indonesia. Untuk mengatasi kendala dalam struktur politik dan ekonomi yang disebabkan oleh prinsip-prinsip Orde Baru, Habibie melaksanakan sejumlah reformasi penting. Salah satu langkah awal yang signifikan adalah memajukan tanggal pemilihan umum demokratis dari 1999 dan 2004, sehingga rakyat Indonesia dapat lebih cepat memilih pemimpin mereka secara langsung. Tujuan dari reformasi Habibie adalah untuk menyelesaikan krisis politik dan ekonomi serta mendorong transisi menuju sistem yang lebih demokratis dan inklusif.<sup>9</sup>

Penugasan Presiden Habibie kepada Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid untuk menyusun tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang politik merupakan langkah penting dalam reformasi politik. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk merubah struktur politik Indonesia. RUU tersebut meliputi:

1. RUU tentang pemilihan umum, yang bertujuan untuk membuat proses pemilihan lebih demokratis dan transparan.
2. RUU mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang mengatur struktur serta peran lembaga legislatif di Indonesia.
3. RUU tentang partai politik, yang bertujuan untuk mengatur organisasi, fungsi, dan peran partai politik dalam sistem politik Indonesia.

Upaya pemerintah Habibie untuk melibatkan pakar eksternal dalam penyusunan undang-undang terlihat dari pembentukan panel yang dipimpin oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, yang terdiri dari tujuh anggota. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Setelah era kepemimpinan otoriter Soeharto, tindakan ini merupakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 102

<sup>9</sup> Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*: Jakarta: Rajawali Press

bagian dari upaya yang lebih luas untuk membawa Indonesia menuju struktur pemerintahan yang lebih demokratis dan representatif.<sup>10</sup>

Pemilihan umum 2004 adalah pemilihan umum ke sembilan yang diadakan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilihan ini berlangsung secara demokratis, dengan dasar pelaksanaannya mengacu pada UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU RI No. 23 Tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>11</sup>

Pemilihan legislatif tahun 2004 tidak diadakan dengan cara yang sama seperti pemilu sebelumnya. Mekanisme pemilu yang tidak memenuhi harapan serta penyelenggara yang bersifat netral dan non-partisan mencerminkan adanya kontradiksi. Dalam kerangka sistem politik dan konstitusi yang baru, pemilu 2004 diawasi oleh pengawas independen yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam konteks politik pasca-reformasi, pemilihan umum memiliki peran krusial di tingkat lokal dan nasional di Provinsi Jambi. Setelah reformasi, terjadi kemajuan administratif dalam sistem pemerintahan daerah, terlihat dari peningkatan jumlah kabupaten dari 5 menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Partai Golkar, yang sering dianggap sebagai partai rezim Soeharto, mendominasi pemilihan di Jambi selama era Orde Baru dengan tingkat kemenangan sekitar 98%, menunjukkan adanya kontrol politik yang kuat dari pemerintah pusat. Namun, reformasi membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik di Indonesia dan Jambi.<sup>13</sup>

Di Jambi, pemilihan umum tahun 2004 sangat signifikan karena untuk pertama kalinya anggota DPR, presiden, dan wakil presiden dipilih secara langsung. Partai baru PAN (Partai Amanat Nasional) berhasil menantang pemenang pemilu 1999 dengan mengangkat Drs. H. Rizal Djalil, M. sebagai ketua DPR Jambi. Di sisi lain, Drs. Antony Zedra Abidin dan Ismail Tajuddin dari Partai Golkar meraih 2 kursi,

---

<sup>10</sup> Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm 34

<sup>11</sup> UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Hlm 48

<sup>13</sup> Jambi Ekspres. *Kencah Politik Melayu Jambi*, edisi 18 Juli 1999. Hlm 3

sementara PDI (Partai Demokrasi Indonesia), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan Demokrat masing-masing memperoleh 1 kursi.<sup>14</sup>

Pemilihan umum di Kota Jambi telah menghadapi berbagai kesulitan sejak reformasi. Data dari Panitia Pengawas Pemilu (sekarang Bawaslu Kota Jambi) mencatat sekitar 200 kasus administrasi yang sedang ditangani, dengan satu kasus dilaporkan kepada penegak hukum. Selain itu, terdapat empat kasus terkait politik uang dan satu kasus yang berkaitan dengan netralitas pejabat.<sup>15</sup>

Intimidasi pemilih, pembelian suara, dan manipulasi suara adalah beberapa bentuk konflik yang muncul selama pemilihan umum 1999 di Jambi dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Di Jambi, terdapat laporan mengenai kecurangan, seperti ketidaksesuaian dalam daftar pemilih, di mana nama-nama fiktif ditambahkan dan pemilih yang sebenarnya dihapus untuk memanipulasi jumlah total suara. Selain itu, ada laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih serta saksi partai politik. Diberitakan bahwa pemilih menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk mendukung partai atau kandidat tertentu, yang menimbulkan masalah serius yang dikenal sebagai "politik uang." Selain itu, terdapat tuduhan mengenai manipulasi dalam perhitungan suara, termasuk pengalihan suara yang sah kepada partai tertentu atau perubahan jumlah suara selama proses rekapitulasi.<sup>16</sup>

Namun, pemilu 1999 dianggap sebagai momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk mengurangi kecurangan dan mencatat pelanggaran, berbagai lembaga independen dan organisasi non-pemerintah (LSM) dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan pemilu. Berbagai langkah diambil, termasuk memperkuat pengawasan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan merombak sistem pemilu, untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang. Selain itu, pengawasan independen dan keterlibatan masyarakat terus ditingkatkan untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Jambi Ekspres. Perhitungan Suara Pemilu 2004. Edisi 2004

<sup>15</sup> Jambi Independet. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). 30 Oktober 1999.

<sup>16</sup> Wawancara. Wein Arifin (45 Tahun) Anggota Bawaslu Kota Jambi

<sup>17</sup> Wawancara. Wein Arifin (45 Tahun) Anggota Bawaslu Kota Jambi

a. lembaga independen yang ada di Jambi:

1. Pwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Lembaga pengawas resmi yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya pemilu.
2. KPUD (Koimisi Pemilihan Umum Daerah) Jambi Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, KPUD bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu, mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara.

b. Organisasi non pemerintah yang ada di Jambi:

1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sering terlibat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, menyuarakan kebutuhan masyarakat yang kurang terwakili, dan mengedukasi publik tentang isu-isu penting.
2. Pers dan Media Lokal Surat kabar seperti Jambi Ekspres, Tribun Jambi, dan radio lokal ikut menyuarakan berbagai temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian selama pemilu berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas menjadikan daya tarik untuk meneliti kehidupan di Jambi pada era kontemporer. Kajian sejarah politik merupakan kajian yang amat menarik , karena sejarah politik adalah sejarah yang mudah diingat terutama peristiwa besar seperti pemilu. Dengan demikian menjadi daya tarik penulis untuk melihat dan mengkaji lebih lanjut pemilihan umum di Jambi pada periode 1999 dan 2004.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kondisi politik Jambi awal Reformasi ?
2. Bagaimana Pelaksanaan pemilu legislatif masa reformasi 1999 dan 2004 di kota Jambi ?
3. Bagaimana dinamika pemilu tahun 1999 dan 2004 di kota Jambi ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Salah satu ciri penting dari penelitian kajian sejarah adalah adanya ruang dan lingkup penelitian. Pelingkupan dan penentuan ruang ini bertujuan agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke area yang tidak relevan, meskipun mungkin akan sedikit menyentuh aspek di luar topik utama. Ruang spasial penelitian ini adalah Kota Jambi, dengan batasan temporal pada tahun 1999 dan 2004. Tahun 1999 dipilih karena merupakan tahun pemilihan umum di masa reformasi, sementara tahun 2004 dipilih sebagai batas akhir karena merupakan pemilihan umum yang pertama kali memilih presiden dan wakil presiden, dan pemilihan legislatif DPR, DPRD secara langsung sejak Indonesia berdiri.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi Politik Jambi pada awal reformasi.
2. Menyelesaikan pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi.
3. Menganalisis dinamika pemilu pada tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan bahan dan referensi untuk penulisan sejarah Jambi selanjutnya, khususnya mengenai pemilihan umum di kota Jambi.
2. Menjadi acuan bagi pemerintahan Kota Jambi dalam menelusuri perkembangan dinamika politik di daerah tersebut.
3. Menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengenal khazanah sejarah di Kota Jambi.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai referensi dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, tinjauan ini juga bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam penulisan

sejarah. Beberapa sumber yang relevan mengenai sejarah pemilihan umum antara lain adalah buku, skripsi, dan jurnal yang membahas topik tersebut.:

Pertama, kajian pemilihan umum di Kota Jambi sudah dikaji oleh Rima Fitriana 2021 dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Ditengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Jambi).<sup>18</sup> Skripsi ini banyak membahas pelaksanaan pemilu di kota Jambi. Walaupun tidak dari sudut pandang sejarah namun skripsi ini sangat membantu dalam melihat aspek aspek pemilu di Kota Jambi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian penulis membahas pemilu di kota Jambi dari sudut pandang sejarah. Sedangkan Tulisan ini membahas partisipasi pemilu akibat wabah. Persamaan yakni sama sama membahas spasial penelitian di Kota Jambi.

Kedua, Edwina Putri 2018 dengan skripsi Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018. Skripsi ini membahas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memberikan fasilitas dan memantau situasi politik yang sedang berlangsung serta bekerjasama dengan KPU Kota Jambi untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar di DPT, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa hambatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu kurangnya dana, kurangnya perhatian masyarakat dan laporan yang terlambat masuk sehingga hal ini menjadi suatu kendala yang membuat proses pendidikan politik tidak maksimal.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulitn penulis yakni pada pokok bahasan yang dikaji. Sedangkan persamaan terletak pad spasial penelitian.

Ketiga, sebuah skripsi Fiska Friyanti 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sejarah Nasional.” Dalam tulisan ini, penulis

---

<sup>18</sup> Rima Fitriana. 2021. Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Ditengah Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Jambi). *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi.

<sup>19</sup> Edwina Putri. 2018. Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018. *Skripsi*. Universitas Jambi.

membahas sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia, meliputi pemilihan pada masa Orde Lama (1955), masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), serta masa Reformasi (1999 dan 2004). Skripsi ini mencerminkan dinamika dan perubahan dalam pemilihan umum dari waktu ke waktu serta membandingkan proses pemilihan dari berbagai periode. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konteks sejarah politik yang dibahas dan perkembangannya. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah cakupan kajian; skripsi ini mencakup sejarah pemilihan umum yang lebih luas dan temporal yang lebih panjang, sedangkan penulis fokus pada era Orde Baru. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam aspek spasial, di mana skripsi ini bersifat nasional, sedangkan penulis terbatas pada cakupan Kota Jambi.<sup>20</sup>

Keempat, tulisan Joevano, dkk 2022 dengan judul Penerapan Pemilu di Indonesia Masa Reformasi<sup>21</sup> Dalam tulisan ini, dibahas mengenai penerapan pemilu di Indonesia pada masa reformasi, yaitu pemilu 1999 dan 2004. Pelaksanaan pemilu pada periode ini memberikan warna baru dalam demokrasi elektoral di Indonesia, terutama dengan munculnya partai-partai politik baru yang sangat antusias untuk berpartisipasi dalam arena politik. Sebanyak 48 partai politik ikut berkontestasi dalam pemilu. Pemilu 1999 sering disebut sebagai pemilu transisi untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu ini juga berlangsung dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 5 bulan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada spasial penelitian sedangkan persamaanya terdapat pada temporal yang masa reormasi.

Kelima, tulisan Muhammad Afied 2014 Hambali dalam skripsinya membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan dan penyelewengan dalam proses seperti pemilu pasca-reformasi. Skripsi ini menyoroti aspek partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratisasi. Kesamaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai pemilu pasca-reformasi,

---

<sup>20</sup> Fiska Friyanti. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Sejarah Nasional. *Skripsi. Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.*

<sup>21</sup> Jovano. Dkk. 2022. Penerapan Pemilu di Indonesia Masa Reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9 (2) (2022): 502, doi: /10.37304/wacana.v9i2.7766

yang menunjukkan bahwa kedua penelitian memperhatikan perkembangan politik di Indonesia setelah reformasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Meskipun periode waktu yang berbeda memberikan kerangka analisis yang berbeda, fokus pada pemilu pasca-reformasi tetap menjadi inti dari kedua penelitian tersebut.<sup>22</sup> Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas pemilu pasca reformasi. Namun dalam tempo waktu berbeda dalam tulisan ini hanya sebatas 2002 sedangkan penulis menggunakan priode 1999 dan 2004.

Keenam, Ismail yang berjudul *Yuridis Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi* sistem pemilu yang digunakan pada Era Orde Baru adalah sistem proporsional dengan sistem daftar tertutup. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, dan partai politik kemudian menentukan calon-calon yang akan menduduki kursi berdasarkan urutan dalam daftar calon yang telah disusun sebelumnya oleh partai. Sistem ini memberikan kendali yang besar kepada partai politik dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat, sementara pemilih memiliki keterbatasan informasi tentang calon-calon individu yang akan mereka dukung. Hal ini dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan, serta membatasi kebebasan pemilih untuk memilih secara langsung calon yang mereka anggap paling layak.<sup>23</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas sejarah pemilihan umum, namun memiliki perbedaa terkait dengan spasial dan priodisasi penelitian.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar berpikir dalam penelitian sejarah politik, khususnya dalam menganalisis pelaksanaan pemilu di Kota Jambi pada masa Reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menyoroti

---

<sup>22</sup> Muhammad Afied Hambali. 2014. *Pemilukada Pasca Reformasi Di Indonesia*. *Journal : Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsa*. 8 (1).

<sup>23</sup> Ismail. *Yuridis*. 2015. *Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi*. *Jurnal. JOM Fakultas Hukum Vol II* (2).

dinamika politik lokal sebagai bagian dari proses demokratisasi pasca-Orde Baru. Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji peristiwa politik secara kronologis dan menganalisis perubahannya melalui kacamata teori politik. Teori digunakan untuk membingkai sekaligus mengarahkan pemahaman terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Dalam konteks ini, teori politik menjadi penting karena memiliki dua fungsi utama. Pertama, teori politik berperan sebagai dasar normatif dalam membentuk perilaku politik yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kedua, teori ini juga berfungsi sebagai alat analisis dalam memahami fenomena politik, seperti proses pemilu dan dinamika kekuasaan. Melalui analisis teori politik, peneliti dapat menarik generalisasi dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan memahaminya dalam konteks perubahan sistem pemerintahan.<sup>24</sup>

Dinamika politik sendiri dipahami sebagai interaksi kompleks antara aktor politik, lembaga, dan masyarakat yang saling memengaruhi dan berubah secara terus-menerus. Dalam suatu sistem politik yang dinamis, perubahan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Konsep ini mencakup aspek perubahan sistem kekuasaan, prosedur pemilu, partisipasi masyarakat, dan regulasi politik. Dinamika politik lokal di Kota Jambi menjadi cerminan dari perubahan yang lebih besar di tingkat nasional pada masa reformasi.<sup>25</sup>

Politik, secara umum, sering dipandang negatif karena identik dengan perebutan kekuasaan. Namun, sesungguhnya politik adalah wadah penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Dalam konteks demokrasi, politik bukan sekadar persaingan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan hubungan antara negara dan masyarakat. Bentuk partisipasi seperti keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemilu merupakan wujud nyata dari interaksi tersebut.<sup>26</sup>

Salah satu bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilu. Pemilu merupakan mekanisme formal untuk mewujudkan kedaulatan

---

<sup>24</sup> Susilastuti, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan (UPN), Hlm 1

<sup>25</sup> R. Siti Zuhro, dkk. *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT THC Mandiri, 2011, hlm. 10–11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

rakyat. Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Meskipun pemilu presiden langsung baru dilaksanakan pada 2004, pemilihan legislatif telah berlangsung di Kota Jambi sejak 1999 dan menjadi bagian dari agenda demokratisasi nasional.<sup>27</sup>

Sebagai bagian dari sistem politik yang demokratis, pemilu membutuhkan institusi penyelenggara yang kredibel dan independen. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu berperan dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu untuk memastikan integritas proses demokrasi berjalan dengan baik, termasuk di tingkat lokal seperti Kota Jambi.<sup>28</sup>

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Indonesia. Reformasi berarti upaya untuk membentuk kembali sistem politik dan birokrasi agar lebih demokratis dan akuntabel. Dalam kerangka ini, reformasi ditujukan untuk menghapus praktik otoritarian, membuka ruang partisipasi publik, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif. Sistem dan struktur pemilu pun mengalami perubahan besar, termasuk pelibatan masyarakat sipil yang lebih luas dalam proses politik.<sup>29</sup>

Dengan memadukan pendekatan sejarah dan teori politik serta mengkaji peran lembaga pemilu, masyarakat, dan institusi pengawasan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kota Jambi. Kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam menganalisis perubahan politik lokal pada masa transisi demokrasi dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

## **1.7 Metode Penelitian**

---

<sup>27</sup> Soemardjan, Selo. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 7.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>29</sup> Dwiyanto, A., dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002, hlm. 12.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan pedoman dan praktik terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan sejarah primer, sebagian besar di antaranya telah dipublikasikan. Pendekatan ini sangat penting untuk memperoleh objek penelitian, dapat dipahami sebagai cara yang terencana dan sistematis untuk melakukan tugas. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo, yang memiliki empat tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>30</sup>

### **1. Heuristik**

Secara terminologi, heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang berarti mencari atau menemukan. Dalam penelitian sejarah, heuristik merujuk pada tahap awal dalam metode historis, yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengidentifikasi sumber-sumber sejarah yang relevan. Tahapan ini sangat penting karena kualitas dan validitas data yang diperoleh akan memengaruhi hasil analisis historis selanjutnya. Sumber sejarah yang dikumpulkan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer merupakan sumber yang berasal langsung dari pelaku, saksi hidup, atau individu yang hidup sezaman dengan peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer berupa wawancara langsung dengan mantan penyelenggara pemilu, tokoh partai politik lokal, dan masyarakat yang ikut serta dalam pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen-dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

---

<sup>30</sup> Kunto wijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang. Hlm 90

Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, seperti hasil rekapitulasi suara, daftar calon tetap (DCT), dan dokumentasi internal lainnya.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak diperoleh langsung dari pelaku sejarah atau saksi mata, namun tetap berfungsi mendukung analisis dan memperkuat narasi historis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai referensi sekunder seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang membahas konteks politik dan pemilu pada masa reformasi. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan Universitas Jambi, perpustakaan daerah, serta platform digital seperti Google Scholar dan situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Penulis juga menggunakan artikel dari surat kabar lokal seperti Jambi Ekspres, Jambi News, dan Berita Yudha sebagai bahan tambahan untuk melihat perkembangan opini publik dan pemberitaan politik pada masa tersebut.

### **2. Kritik Sumber**

Untuk membandingkan data yang diperoleh selama tahap heuristik, dilakukan kritik sumber. Tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan. Dengan membandingkan sumber referensi seperti yang ditemukan secara daring dan di surat kabar kritik ekstern dapat dilakukan untuk menentukan apakah ada perubahan dan seberapa besar perubahan tersebut. Terhadap Dinamika pelaksanaan Pemilihan Umum Masa Reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004.

### **3. Interpretasi**

Tujuan dari interpretasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara fakta dan data. Diharapkan keduanya dapat menjelaskan satu peristiwa dengan yang lainnya secara kronologis. Untuk merumuskan pernyataan yang ringkas dan mudah dipahami, yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang tepat, peneliti menganalisis fakta dan data selama proses interpretasi. Dalam penelitian ini diharapkan mendapat kejelasan Mendapat kejelasan antara fakta dan nyata dinamika pelaksanaan pemilihan umum masa reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004.

#### **4. Historiografi**

Proses pengaturan dan penyajian sejarah dengan menggunakan pemikiran serta analisis literatur dari berbagai sumber dikenal sebagai historiografi. Tujuan dari historiografi adalah menyajikan peristiwa sejarah dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berusaha menyusun cerita menurut peristiwa berdasarkan kronologi dan agar dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah menjadi rangkaian peristiwa yang masuk akal dalam mendekati kebenaran. Dalam penelitian ini ditulis dan disajikan sesuai dengan kebenaran data terhadap dinamika pelaksanaan pemilihan umum masa reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004.

#### **1.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Demokrasi di Kota Jambi 1999 dan 2004” akan di paparkan melalui penulisan sistematika dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memaparkan proposal skripsi yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN POLITIK DI KOTA JAMBI pada bab ini akan membahas politik secara umum di kota Jambi.

BAB III PELAKSANAAN PEMILU DI KOTA JAMBI 1999 dan 2004 dalam bab ini akan melihat bagaimana pemilihan umum di kota Jambi pada masa reformasi meliputi persiapan, pelaksanaan dan kontestan pemenang pemilu di kota Jambi.

BAB IV DINAMIKA PEMILU TAHUN 1999 DAN 2004 di kota Jambi dalam bab ini akan membahas lebih lanjut pemilihan legislatif secara langsung di kota Jambi persiapan, pelaksanaan dan kontestan pemenang pemilu di kota Jambi.

BAB V PENUTUP